

KESEPAKATAN INGGRIS TERHADAP EUROPEAN UNION-UNITED KINGDOM TRADE AND COOPERATION AGREEMENT (TCA) PASCA BRITAIN EXIT 2020

Oleh: Nabila Arista Wedhea

Email: nabilaaristawedhea@gmail.com

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The results of the Brexit referendum in 2016 with a majority of people voting to leave the European Union made the UK no longer bound by all rules originating from the European Union. During the Brexit transition period, the UK designed and prepared a new government and negotiated a future cooperative relationship with the European Union. Through 9 rounds of cooperation negotiations with the European Union, on 24 December 2020 British and European Union negotiators reached an agreement on a cooperation agreement. The EU-UK Trade and Cooperation Agreement has changed the basics of Britain's relationship with the European Union to become a free trade and cooperation relationship. This paper shows the factors used by the UK to determine its foreign policy in agreeing to the TCA.

This research uses the perspective of neo-liberalism and foreign policy theory. The method used in this research is explanatory qualitative with literature study data collection techniques both physical and digital.

The results showed that the UK's decision to agree on the TCA was due to internal and external factors that influenced the UK's decision. Britain's internal factors can be seen in the implications of Brexit on the British economy, interest in regulating access to and operating transportation services, and interest in managing aquatic resources. Indicators of the UK's external factors are the ease of access to EU countries, the threat of terrorism from outside, eliminating the European Union's tariff barrier, and increasing foreign investment from the EU.

Keywords: EU-UK Trade and Cooperation Agreement, Brexit, European Union

1. PENDAHULUAN

Pada 1 Januari 1973 Inggris resmi menjadi anggota Uni Eropa dengan total 9 negara keanggotaan pada saat itu.¹ Masuknya Inggris menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan adanya kepentingan motif ekonomi dan politik. Selama keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa terjadi berbagai pasang surut serta terdapat berbagai perbedaan antara Inggris dan Uni Eropa mulai dari *European Monetary Union* (EMU), Bank Sentral Eropa, penggunaan mata uang tunggal, hingga perbedaan pandangan pada Bab Sosial dalam Perjanjian Maasstricht.²

Berbagai perbedaan dan perdebatan yang terjadi antara Inggris-Uni Eropa, pada tanggal 23 Juni 2016 Inggris melalui proses referendum terkait wacana Brexit sehingga menjadikan masyarakat Inggris terpecah menjadi 2 kubu dengan 52% memilih untuk keluar dari Uni Eropa, 48% memilih mempertahankan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Pada 31 Januari 2020 secara resmi Inggris tidak lagi menjadi anggota dari Uni Eropa. Masa transisi Brexit dimulai saat Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 dan dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2020. Berakhirnya masa

transisi Inggris setelah meninggalkan Uni Eropa menegaskan bahwa Inggris telah meninggalkan Pasar Tunggal Uni Eropa dan Serikat Pabean dan undang-undang Uni Eropa tidak lagi berlaku di Inggris.

Akan tetapi dengan adanya Brexit memberikan dampak dengan menjadikan perekonomian Inggris berada di sebuah ketidakpastian, berbagai penyesuaian berkelanjutan terkait dengan pengaturan perdagangan pasca Brexit turut menimbulkan tantangan bagi berbagai bisnis di Inggris.³ Adanya Brexit ditambah dengan menyebarnya pandemi Covid turut menjadikan investasi bisnis di Inggris juga berada di sebuah ketidakpastian. Brexit turut berdampak dengan menurunnya angka tenaga kerja muda di Inggris yang sebagian besar berasal dari negara anggota Uni Eropa.

Dampak selanjutnya akan terjadi penurunan nilai pondsterling, Inggris juga akan kehilangan tarif nol dan akses tanpa kuota ke Pasar Tunggal, hal ini kemudian berdampak pada produk daging sapi, susu, unggas, babi, domba, sereal, gula, dan beberapa bahan makan olahan yang akan dikenakan tarif sekitar 50% atau lebih di bawah tarif WTO.⁴

Adanya berbagai dampak buruk yang dialami Inggris pasca Brexit maka dibutuhkan sebuah

¹ Kurniawati and Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ, 'Inggris Dalam Uni Eropa: Keanggotaan Setengah Hati?', *Jurnal Sejarah Lontar*, 6.2 (2009), p 68.

² Fidya Faridah Kultsum and Erlina Wiyanarti, 'Dinamika Inggris Dan Uni Eropa: Integrasi Hingga Brexit', *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7.2 (2018), p 169 <<https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15603>>.

³ Bank of England, 'Shocks, Uncertainty, and the Monetary Policy Response - Speech by Dave Ramsden _ Bank of England'.

⁴ European Commission, 'Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement', *European Commission*, 2020 <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532> [accessed 29 January 2023]

kesepakatan perjanjian kerja sama baru antara Inggris dan Uni Eropa. Pada 24 Desember 2020 negosiator Inggris dan Uni Eropa bertemu di Brussel untuk mencapai kesepakatan perjanjian perdagangan dan kerja sama. Disepakatinya *EU-UK Trade and Cooperation Agreement* telah mengubah dasar hubungan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa dari hukum Uni Eropa menjadi perdagangan bebas dan kerja sama.⁵ Melalui TCA, Inggris akan bekerja sama dengan Uni Eropa dengan pengaturan preferensial di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi, perdagangan digital, *intellectual property*, pengadaan publik, penerbangan dan transportasi jalan, energy, perikanan, *social security coordination*, penegakkan hukum dan kerja sama peradilan dalam masalah pidana, kerja sama tematik, dan *participation in EU programmes*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Mengapa Inggris menyepakati *EU-UK Trade and Cooperation Agreement* pasca Brexit 2020?”

2. KERANGKA TEORI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan perspektif, konsep, dan teori yang mana dalam mempelajari hubungan internasional tidak ada perspektif, konsep, dan teori yang tunggal.

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan perspektif neo-liberalisme atau yang juga sering disebut dengan neo-liberal institutionalism. Neo-liberalisme memiliki fokus utama pada

International Political Economy (IPE) dan lingkungan dengan mementingkan efisiensinya terhadap pertumbuhan perekonomian.⁶ Untuk dapat mencapai tujuannya, neo-liberalisme akan mempermudah jalan dengan menghapuskan semua penghalang seperti penetapan tarif bea masuk, peraturan, beberapa standar juga undang-undang, serta halangan investasi dan aliran lalu-lintas modal. Dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi, neo-liberalisme membutuhkan kerja sama yang nantinya dapat menimbulkan interpedensi.

Level analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara atau *state level analyse*. Dimana melalui *state level analyse* ini dibutuhkan pemahaman dalam mengetahui alasan dari kelompok kepentingan negara baik kaum birokrat maupun badan legislatif dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kebijakan luar negerinya.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri atau *foreign policy*. Kebijakan luar negeri merupakan rumusan strategi, metode, pedoman atau kesepakatan yang digunakan sebuah negara dalam menjaga dan memajukan kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain baik secara bilateral ataupun multilateral ataupun dengan aktor non-negara.⁷

⁶ Robert Jervis, ‘Realism , Neoliberalism , and Cooperation Understanding the Debate’, *International Security*, 24.1 (1999), p 45.

⁷ Jesmine Ahmed, ‘The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- An Analyses’, *Journal of Critical Reviews*, 7.2 (2020), <<https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.144>>. p 787

Hartmann memandang bahwa hubungan internasional merupakan suatu studi yang berfokus terhadap proses dimana sebuah negara menyesuaikan kepentingan nasionalnya dengan kepentingan negara lain.⁸ Kebijakan luar negeri sebuah negara ditentukan oleh 2 faktor penting yaitu lingkungan domestic dan lingkungan eksternal, hal ini dikarenakan adanya tabrakan atau ketergantungan yang terjalin antara kebijakan luar negeri dengan politik dalam negeri.⁹

Hill juga memiliki pandangan bahwa kebijakan luar negeri bergantung kepada faktor domestic dan politik internasional¹⁰ sehingga dapat dilihat bahwa faktor yang membantu dalam membentuk atau menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh 2 faktor penting yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanatif yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” sehingga penelitian ini memberikan penjelasan terjadinya suatu peristiwa.¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka baik fisik ataupun digital. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan

dari website resmi pemerintahan Inggris dan Uni Eropa yang berupa *press release* dan laporan pemerintahan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, serta surat kabar online.

3. Isi

3.1 Faktor Internal Inggris Menyepakati *EU-UK Trade and Cooperation Agreement*

3.1.1 Implikasi Negatif Brexit Terhadap Perekonomian

Keluarnya Inggris dari Pasar Tunggal memberikan dampak terhadap perekonomian Inggris yang terlihat sangat signifikan pada output ekonomi, angka perdagangan, ekspor dan impor, tingkat tenaga kerja, juga di bidang investasi. Pada malam referendum, nilai poundsterling mengalami penurunan. Melemahnya nilai poundsterling membuat rumah tangga Inggris menjadi lebih miskin dengan meningkatnya biaya impor, yang menyebabkan inflasi lebih tinggi dan kemudian berdampak pada pertumbuhan upah riil yang lebih rendah.¹²

Adanya brexit menyebabkan kinerja ekspor Inggris ke UE sebagai pasar terbesar Inggris mengalami penurunan, kemudian kekurangan tenaga kerja yang signifikan juga terjadi di banyak sektor ekonomi Inggris. Menurunnya intensitas perdagangan Inggris ini akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan produktivitas jangka panjang. Neraca berjalan Inggris sebelum tenggat waktu awal brexit

⁸ *Ibid.*

⁹ Reetesh Jain, ‘Significance and Determinants of Foreign Policy’, *International Journal of Advanced Research and Development*, 3.1 (2018), p 166.

¹⁰ Bojang AS, ‘The Study of Foreign Policy in International Relations’, *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 06.04 (2018) <<https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>>, p 2.

¹¹ W Gulo, *Metodologi Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). P 19

¹² Swati Dhingra, ‘Expecting Brexit - UK in a Changing Europe’, *UK in Changing Europe*, 2022 <<https://ukandeu.ac.uk/expecting-brexit/>> [accessed 6 February 2023].

pada 29 Maret 2019 mengalami defisit secara terus-menerus.¹³

Hal ini menunjukkan pentingnya ekonomi yang besar dari pasar Eropa untuk Inggris yang dihasilkan terutama dari kemudahan hubungan perdagangan pasar tunggal. Oleh karena itu hubungan pasca-brexit Inggris dengan UE membawa implikasi ekonomi yang lebih dalam, dengan adanya TCA diharapkan dapat melayani kepentingan ekonomi Inggris hingga tingkat tertentu.¹⁴

Perjanjian TCA mencerminkan kebijakan perdagangan modern UE berkat dimasukkannya komitmen ambisius untuk perlindungan hak-hak pekerja dan konsumen, perlindungan lingkungan, perjuangan melawan perubahan iklim dan transparansi pajak, sehingga memastikan bahwa perdagangan tidak hanya terbuka tetapi juga adil dan berkelanjutan. TCA akan menciptakan komitmen kerja sama ambisius untuk meliberalisasi akses pasar untuk barang, termasuk di dalamnya pengaturan nol taif dan nol kuota untuk semua barang, serta aturan modern untuk menghindari hambatan dalam hubungan bilateral perdagangan.¹⁵

3.1.2 Pengaturan Akses dan Pengoperasian Layanan Transportasi

Di saat Inggris masih menjadi anggota UE dan berpartisipasi dalam pasar tunggal juga serikat pabean, operator layanan transportasi dapat

beroperasi secara bebas berdasarkan. Karena Inggris tidak lagi menjadi anggota dari UE maka semua bisnis transportasi yang melakukan operasi antara Inggris-UE wajib mematuhi syarat sertifikasi Inggris dan UE.

TCA mencakup di dalamnya syarat serta ketentuan terkait operator transportasi udara, angkutan darat dan bus penumpang, serta operator transportasi laut yang akan melakukan layanan antara Inggris-UE. TCA juga mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa persaingan antara operator Inggris-UE berlangsung pada tingkat yang sama, memastikan tingkat keselamatan transportasi yang tinggi, hak pekerja dan penumpang, serta perlindungan lingkungan. Semua operator, pengemudi, dan kendaraan yang terlibat dalam perjalanan lintas batas akan terikat oleh standar TCA yang telah disepakati yang khusus untuk sektor pengangkutan jalan raya.¹⁶

Secara umum TCA memberikan hak terbatas bagi maskapai Inggris-UE dan memberikan kebebasan bagi Inggris untuk bernegosiasi dengan masing-masing negara anggota UE untuk penyediaan hak kebebasan kelima untuk semua layanan kargo.¹⁷ Melalui TCA operator Inggris dan UE diperlakukan sebagai operator negara ketiga di wilayah udara masing-masing. TCA juga akan mencakup ketentuan khusus tentang masalah bisnis di samping ketentuan untuk perlindungan hak penumpang. TCA akan memastikan tidak ada pihak yang dapat melarang pajak atas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Riaz Shad, 'UK's Post-Brexit Economic Prospects in View of Its Trade and Cooperation Agreement (TCA) with the EU', *Journal of European Studies (JES)*, 61.6 (2021), p 28.

¹⁵ European Commission, 'Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement'. Op.Cit.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dominic Stuttford and Susie Brain, 'Impact of Brexit on Taransport', *Norton Rose Fulbright*, 2021 <<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/a1b057b9/impact-of-brexit-on-tax>> [accessed 18 February 2023].

bahan bakar yang dipasok ke pesawat terbang secara diskriminatif.¹⁸

Inggris-UE melalui TCA menyepakati untuk bus reguler internasional untuk terus menghubungkan Inggris-UE. TCA tidak memberikan izin untuk operator Inggris untuk mengangkut penumpang antara dua titik di UE (kecuali di Irlandia), dan sebaliknya untuk operator UE di Inggris.

3.1.3 Kepentingan Hak dalam Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Keluarnya Inggris dari UE berarti Inggris tidak lagi menggunakan kerangka hukum bersama UE, maka Inggris juga turut akan meninggalkan *Common Fisheries Policy*. Dengan meninggalkan CFP maka Inggris akan menjadi negara pantai yang mandiri dimana ini akan mengubah peraturan pengelolaan perikanan di Samudra Atlantik Timur Laut dan di Laut Utara. Selanjutnya UE dan Inggris akan bertanggung jawab berdasarkan hukum laut internasional untuk mengelola bersama sekitar 100 stok ikan bersama.

TCA mencakup peraturan baru yang menetapkan pengelolaan bersama dan berkelanjutan dari banyaknya stok ikan bersama di perairan Inggris-UE sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dengan sepenuhnya menghormati hak dan kewajiban masing-masing negara. TCA juga berisi konservasi dan kerangka kerja manajemen, serta aturan tentang otoritas dan lisensi juga menetapkan akses timbal balik ke perairan Inggris-UE serta kelanjutan hak

¹⁸ European Commission, 'Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement'. Op.Cit.

historis untuk menangkap ikan di perairan territorial antara 6 dan 12 mil.

TCA akan memberikan peningkatan kuota sebesar 25% dari nilai tangkapan UE di perairan Inggris dan akan dilakukan secara bertahap selama lebih dari lima tahun.¹⁹ Adanya kesepakatan ini akan mengakhiri ketergantungan armada Inggris pada mekanisme *relative stability* yang tidak adil, hal ini berarti kapal-kapal Inggris dapat mengambil proporsi yang lebih besar dari total pendaratan dari perairan Inggris dan UE kedepan²⁰

3.2 Faktor Eksternal Inggris Menyepakati *EU-UK Trade and Cooperation Agreement*

3.2.1 Kemudahan Akses Masuk ke Negara Uni Eropa

Keluarnya Inggris dari UE hal ini berarti berakhir pula pergerakan bebas Inggris-UE termasuk di dalamnya partisipasi dalam pasar tenaga kerja nasional. Akhir dari pergerakan bebas antara Inggris-UE berarti hambatan baru untuk berpergian yang akan berdampak pada bisnis Inggris dan UE. Inggris mengekspor 317 miliar pondsterling jasa ke UE dan mengimpor 217 miliar poundsterling jasa dari UE pada tahun 2019.²¹ Dengan adanya brexit warga negara Inggris tidak lagi memiliki kebebasan untuk bekerja, memulai bisnis, atau tinggal di UE.

¹⁹ 'UK-EU Trade and Cooperation Agreement', *Institute for Government*, 2020 <<https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/uk-eu-trade-and-cooperation-agreement>> [accessed 10 February 2023].

²⁰ 10 Downing Street Prime Ministers Office, *UK-EU TRADE AND COOPERATION AGREEMENT Summary*, 2020, p 24.

²¹ European Union Committee, *Beyond Brexit: Trade in Goods*, *UK Parliament*, 2021, p 3.

Disepakatinya TCA adalah untuk kembali ke tingkat komitmen pada perpindahan sementara personil untuk tujuan bisnis, ketentuan yang juga dapat ditemukan di negara lain.²² TCA mencakup komitmen yang mempengaruhi perjalanan bisnis sementara dengan menawarkan akses profesional antara Inggris dan UE. Selanjutnya TCA memberikan komitmen di dalamnya yang terkait dengan pengunjung bisnis jangka pendek, pengunjung bisnis untuk tujuan pendirian, penerimaan transfer *intra-corporate*, pemasok layanan kontrak, dan profesional independen.²³

UE melalui TCA telah mengizinkan kunjungan singkat bebas visa jangka pendek warga negara Inggris hingga 90 hari dalam jangka waktu 180 hari, Inggris juga telah memutuskan untuk mengizinkan kunjungan singkat bebas visa kunjungan jangka panjang untuk warga negara UE.²⁴ Ketentuan TCA merupakan peningkatan yang jelas dibanding dengan *no deal* dibawah *WTO GATS Framework*. TCA memfasilitasi perjalanan bisnis jangka pendek dan mencakup ketentuan liberal untuk penerima transfer *intra-corporate* serta kelas perpindahan sementara lainnya.²⁵

²² Ingo Bochert and Minako Morita - Jaeger, *Taking Stock of the UK-EU Trade and Cooperation Agreement: Trade in Services and Digital Trade*, 2021, p 4.

²³ Ilze Jozepa, Sasha Gorb, and Melanie Gower, *EU-UK Trade and Cooperation Agreement: Temporary Business Travel*, House of Commons Library, 2020, p 2.

²⁴ European Commission, 'Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement'. Op.Cit.

²⁵ Ingo Bochert and Minako Morita. Op.Cit. p 5.

3.2.2 Adanya Ancaman Terorisme

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadikan Inggris kehilangan forum untuk koordinasi kebijakan luar negeri dan keamanan. Keluarnya Inggris dari UE berarti Inggris tidak lagi menjadi pihak dalam pengelolaan *Europol* dan *Eurojust*, hal ini berarti pula bahwa Inggris kehilangan akses ke database seperti SIENA dan partisipasinya dalam tim investigasi akan tunduk pada hukum UE. Selanjutnya Inggris hanya akan bergantung pada database Interpol.

Inggris dan UE sama-sama berada di lingkungan keamanan yang serupa dalam menghadapi sejumlah ancaman keamanan dan pertahanan yang serius diantaranya kebangkitan Rusia, konflik sipil, kejahatan lintas batas, kejahatan dunia maya dan ancaman terorisme yang meningkat.

Di dalam TCA yang telah disepakati pada *Part 3 Title X* terkait dengan *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing* menyatakan Inggris-UE mendukung upaya internasional untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, pertukaran informasi yang relevan, dan memelihara rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang komprehensif. Kerja sama terkait hal ini dilakukan dengan mengonfirmasi komitmen berkelanjutan Inggris-UE terhadap standar *Financial Action Task Force (FATF)*.²⁶

TCA menetapkan pengaturan untuk memastikan transparansi kepemilikan manfaat bagi perusahaan dan perwalian dan pertukaran informasi tersebut antara otoritas berwenang. TCA menekankan kepada Inggris-UE

²⁶ European Commission, 'Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement'. Op.Cit.

untuk meningkatkan kerja sama kontra-terorisme melalui pengadaan dialog reguler terkait masalah tersebut sehingga memungkinkan berbagi penilaian tentang ancaman terorisme, melakukan pertukaran praktik dan keahlian dalam penanggulangan terorisme, melakukan kerja sama operasional dan pertukaran informasi, serta pertukaran kerja sama dalam kerangka organisasi multilateral.

Adanya kerja sama ini akan memungkinkan Inggris untuk mengambil bagian dalam operasi bersama dalam tim investegasi dan dalam proyek analisis di bidang kejahatan tertentu seperti perdagangan narkoba atau terorisme, mendapatkan dukungan analitis dari *Europol*, menggunakan saluran komunikasi umum yang aman, berbagi data dengan *Liaison Officers to Europol* dan *Liaison Prosecutor to Eurojust*. Akan tetapi Inggris tidak memiliki akses penuh ke *Europol Information System* ataupun sistem manajemen kasus *Eurojust*, juga tidak memiliki peran apapun dalam tata kelolanya.

3.2.3 Menghilangkan *Tarriff Barrier* UE

TCA disepakati untuk mempertahankan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas yang ambisius tanpa tarif atau kuota pada produk, mekanisme kerja sama peraturan dan bea cukai, serta ketentuan yang menjamin persaingan yang adil dan terbuka. TCA menetapkan sejumlah langkah dimana Inggris-UE meminimalkan perbedaan peraturan teknis dan

mendorong penggunaan standar internasional yang relevan.²⁷

Tanpa disepakatinya TCA maka produk daging sapi, susu, unggas, babi, domba, sereal, gula, dan beberapa bahan makan olahan akan dikenakan tarif sekitar 50% atau lebih di bawah tarif WTO.²⁸ Untuk produk olahan ikan akan dikenakan tarif hingga 25%, mobil 10%, tekstil dan alas kaki akan dikenakan puncak tarif masing-masing sebesar 12% dan 17%.²⁹ Adanya kebijakan tarif ini nantinya akan menaikkan harga bagi konsumen, dan menyebabkan kerusakan ekonomi bagi produsen pertanian dan manufaktur di kedua sisi. Terkait dengan masalah bea cukai, Inggris-UE sepakat untuk saling mengakui *Authorised Economic Operators* (AOE) satu sama lain.

TCA akan membatasi biaya yang dikenakan bea cukai untuk layanan yang diberikan mencakup beberapa disiplin modern yang melampaui standar komitmen WTO, misalnya pembatasan impor dan ekspor monopoli, *non-automatic* lisensi impor, pembatasan impor dan ekspor (larangan persyaratan harga dan lisensi tunduk pada persyaratan kinerja).³⁰ TCA juga mencakup protokol terkait bantuan timbal balik untuk memerangi penipuan pabean serta protokol ambisius yang memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemulihan klaim yang berkaitan dengan pajak dan bea tidak langsung.³¹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

3.2.4 Meningkatkan Investasi Asing dari UE

Pada tahun 2017-2018 proyek FDI di Inggris mengalami penurunan 9,3%, dan pada tahun 2018-2019 FDI turun 16,3%. Namun pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan sekitar 3,8%, hal ini dikarenakan perusahaan yang ingin mempertahankan keberadaan Inggris sebelum keluarnya Inggris dari UE. Investor termotivasi untuk membangun operasi sementara Inggris masih mendapatkan manfaat dari akses ke pasar tunggal dan serikat pabean UE.³² Pada tahun 2020-2021 jumlah proyek FDI kembali menurun hingga 17%, hal ini dipengaruhi oleh dampak Covid-19 dan ketidakpastian terkait dengan brexit tanpa kesepakatan sebelum TCA ditandatangani pada akhir 2020. Menurunnya tingkat investasi di Inggris turut dikarenakan terdapatnya pasar yang berbeda dari UE yang akan menjadikannya platform ekspor yang kurang menarik bagi perusahaan multinasional, dan terdapat rantai pasokan yang kompleks antara kantor pusat dan cabang lokal dari perusahaan multinasional tersebut dan biaya koordinasi yang dikeluarkan oleh mereka mengakibatkan manajemen yang lebih sulit.³³

³² Davies, Naomi, 'After Two Years, What Impact Has Brexit Had on the UK? Investment Monitor', *Investment Monitor*, 2022

<<https://www.investmentmonitor.ai/analysis/two-years-brexit-uk-eu>> [accessed 6 February 2023]

³³ Jaskiran Kaur, 'Brexit's Impact On The UK's Foreign Investment Regime In Light Of The New EU-UK Trading Relationship', NYU JLB

<<https://www.nyu.edu/jlb/single-post/brexit-s-impact-on-the-uk-s-foreign-investment-regime-in-light-of-the-new-eu-uk-trading-relationship>> [accessed 18 February 2023].

Melalui TCA Inggris-UE setuju untuk menggunakan upaya terbaik mereka untuk memastikan bahwa standar yang disepakati secara internasional di sektor jasa keuangan diterapkan mencakup standar dari *Basel Committee*, *IOSCO*, *FATF*, dan *OECD*. Untuk beberapa ketentuan umum tingkat tinggi yang berkaitan dengan jasa dan investasi (termasuk perlakuan negara yang paling disukai) berlaku, ketentuan khusus yang mengatur penyediaan jasa keuangan berlaku untuk (dan mengesampingkan) ini, termasuk "prudential carve-out" yang signifikan.³⁴

Secara keseluruhan TCA mengunci tingkat keterbukaan yang ada terhadap investasi dari luar Inggris atau UE. Di dalam TCA disepakati aturan terkait dengan investasi internasional dan perdagangan jasa (komitmen inti) yang memungkinkan perusahaan dari masing-masing pihak untuk menjual layanan kepada, dan berinvestasi di pihak lain, tanpa diskriminasi.³⁵ Kewajiban non-diskriminasi pada TCA akan memastikan bahwa pemasok layanan atau investor dari UE akan diperlakukan tidak kalah bakinya dengan operator Inggris di Inggris, dan sebaliknya. Hal ini akan memberikan mereka hak untuk menerima perlakuan yang lebih baik daripada yang diberikan kepada pemasok jasa atau investor negara ketiga tanpa ketentuan serupa.

³⁴ 'A Business-Friendly Guide to the UK-EU Brexit Trade Deal', Op.Cit.

³⁵ 'UK-EU Trade and Cooperation Agreement: Reservations', *GOV.UK*, 2021 <<https://www.gov.uk/guidance/uk-eu-trade-and-cooperation-agreement-reservations>> [accessed 18 February 2023].

4. Simpulan

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA) menjadi langkah awal kembali hubungan kerja sama antara Inggris dan Uni Eropa setelah sebelumnya Inggris mengadakan referendum brexit pada tahun 2016. Sebelum secara resmi meninggalkan Uni Eropa, Inggris terlebih dahulu berada di masa transisi. Selama masa transisi ini Inggris-Uni Eropa melakukan negosiasi kembali hubungan kerja sama perdagangannya (TCA) yang berlangsung selama 9 putaran.

Selama negosiasi berlangsung Inggris dalam menetapkan kebijakannya akan memperhatikan faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi tindakannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat dua faktor penting sebuah negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya, yaitu adanya faktor internal dan faktor external.

Faktor internal Inggris lebih didominasi oleh perekonomiannya. Pasca referendum brexit, perekonomian Inggris berada dalam ketidakpastian yang menimbulkan tantangan baru dalam bisnis, perdagangan, dan tingkat tenaga kerja. Melalui TCA Inggris menjalin kerja sama perdagangan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dengan adanya kebijakan tarif dan kuota.

Terkait dengan faktor eksternal, Inggris menyepakati TCA akan memberikan keuntungan kemudahan akses masuk dan keluar dari Uni Eropa yang mana hal ini juga turut berhubungan dengan investasi dalam sektor keuangan. Selanjutnya meskipun tidak secara mendetail, Inggris-Uni Eropa turut menjalin kerja sama dalam bidang keamanan terkait dengan ancaman terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Bojang AS, 'The Study of Foreign Policy in International Relations', *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 06.04 (2018) <<https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>>
- Jesmine Ahmed, 'The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- An Analyses', *Journal of Critical Reviews*, 7.2 (2020), <<https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.144>>.
- Kultsum, Fidya Faridah, and Erlina Wiyanarti, 'Dinamika Inggris Dan Uni Eropa: Integrasi Hingga Brexit', *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7.2 (2018), <<https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15603>>
- Kurniawati, and Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ, 'Inggris Dalam Uni Eropa: Keanggotaan Setengah Hati?', *Jurnal Sejarah Lontar*, 6.2 (2009)
- Muhammad Riaz Shad, 'UK's Post-Brexit Economic Prospects in View of Its Trade and Cooperation Agreement (TCA) with the EU', *Journal of European Studies (JES)*, 61.6 (2021).
- Reetesh Jain, 'Significance and Determinants of Foreign Policy', *International Journal of Advanced Research and Development*, 3.1 (2018).
- Robert Jervis, 'Realism , Neoliberalism , and Cooperation Understanding the Debate', *International Security*, 24.1 (1999).

BUKU

W Gulo, *Metodologi Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)

DOKUMEN RESMI

England, Bank of, ‘Shocks, Uncertainty, and the Monetary Policy Response - Speech by Dave Ramsden – Bank of England’.

European Union Committee, *Beyond Brexit: Trade in Goods, UK Parliament*, 2021.

Ingo Bochert and Minako Morita - Jaeger, *Taking Stock of the UK-EU Trade and Cooperation Agreement: Trade in Services and Digital Trade*, 2021.

Ilze Jozepa, Sasha Gorb, and Melanie Gower, *EU-UK Trade and Cooperation Agreement: Temporary Business Travel, House of Commons Library*, 2020.

UK Cabinet Office, ‘Summary: The UK’s New Relationship with the EU’, 2021.

WEBSITE

Davies, Naomi, ‘After Two Years, What Impact Has Brexit Had on the UK? Investment Monitor’, *Investment Monitor*, 2022 <<https://www.investmentmonitor.ai/analysis/two-years-brexit-uk-eu>> [accessed 6 February 2023]

Dominic Stuttford and Susie Brain, ‘Impact of Brexit on Taransport’, *Norton Rose Fulbright*, 2021 <<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/a1b057b9/impact-of-brexit-on-tax>> [accessed 18 February 2023].

European Commission, ‘Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement’, *European Commission*, 2020

<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532> [accessed 29 January 2023]

Jaskiran Kaur, ‘Brexit’s Impact On The UK’s Foreign Investment Regime In Light Of The New EU-UK Trading Relationship’, NYU JLB

<<https://www.nyujl.org/single-post/brexit-s-impact-on-the-uk-s-foreign-investment-regime-in-light-of-the-new-eu-uk-trading-relationship>> [accessed 18 February 2023].

Swati Dhingra, ‘Expecting Brexit - UK in a Changing Europe’, *UK in Changing Europe*, 2022 <<https://ukandeu.ac.uk/expecting-brexit/>> [accessed 6 February 2023]. ‘UK-EU Trade and Cooperation Agreement: Reservations’, *GOV.UK*, 2021 <<https://www.gov.uk/guidance/uk-eu-trade-and-cooperation-agreement-reservations>> [accessed 18 February 2023].

‘UK–EU Trade and Cooperation Agreement’, *Institute for Government*, 2020 <<https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/uk-eu-trade-and-cooperation-agreement>> [accessed 10 February 2023].